



MODUL 4

KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pelatihan Kerangka REDD+
dan *Safeguards* Lingkungan,
Sosial, dan Gender
Proyek Indonesia REDD+
RBP Periode Hasil
2014-2016





MODUL 4

KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pelatihan Kerangka REDD+ dan *Safeguards*
Lingkungan, Sosial, dan Gender

Proyek Indonesia REDD+ RBP
Periode Hasil 2014-2016





MODUL 4. KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pengarah

1. Ir. Ary Sudijanto, M.S.E., Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
2. Dr. Joko Tri Haryanto, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH), Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
3. drh. Indra Exploitasia Semiawan, M.Si., Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kehutanan
4. Celina Kin Yii Yong, *Senior Regional Technical Advisor for Climate and Forest*, UNDP

Penanggung Jawab

1. Endah Tri Kurniawaty, Direktur Penghimpunan dan Pengembangan Dana, BPD LH, Kemenkeu
2. Irawan Asaad, S.T., M.Sc., Ph.D., Direktur Mitigasi Perubahan Iklim, Kedeputusan PPITKNEK, KLH/BPLH
3. Dr. Kusdamayanti, Kepala Pusdiklat SDM Kementerian Kehutanan
4. Iwan Sutiaji, Direktur Hukum dan Manajemen Risiko, BPD LH, Kemenkeu
5. Dr. Aretha Aprilia, Kepala Unit Lingkungan Hidup, UNDP
6. Dr. Erwin Widodo, Senior Advisor untuk Lingkungan dan Kehutanan, UNDP

Tim Penyusun

Hening Parlan, Ery Nugraha, Jakfar Hary Putra, Caroline van der Sluys, Elizabeth Eggerts, Celina Kin Yii Yong, Henny Irawati, Esi Fajriani, Priyaji Agung Pambudi

Tim Pendukung

Havez Annamir, Fitra Wahyudi Sembiring, Tumbur Harapan Jaya, Sudaryanto, Chandra Agung Septiadi Putra, Zahra Salsabila, Bayu Adhi Nugroho, Rini Dwi Setyanti, Rini Siti Rohaeni, Raka Aditya Wibisono, Muhamad Hasan Bakri, Raipan Rifansyah, Muhammad Hafizh Zhafran Nurrachman, Dian Pahala Silalahi, Eko Prasetyo Nugroho, Farrah Audina Fathya

Ucapan Terima kasih kepada para pihak yang berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan modul, yakni: Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Biro Hubungan Masyarakat (Biro Humas) KLH/BPLH, Biro Hubungan Masyarakat (Biro Humas) Kemenhut, Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) KLH/BPLH, Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemenhut, Majelis Lingkungan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) SDM LHK, UNDP, serta peserta *Focus Group Discussion* (FGD) dari wakil Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Konsultan Swasta, Lembaga Penelitian Internasional, serta Lembaga Pendanaan Internasional.

MODUL 4. KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Hak Cipta

© 2025 | BPDH | Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kehutanan

Diterbitkan Oleh

**Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDH),
Kementerian Keuangan**

JB Tower Lt 29-30, Jl. Kebon Sirih No. 48-50, RT 011/002,
Gambir, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10110

Sumber Foto

*Project Management Unit (PMU), Proyek REDD+ RBP GCF
Output 1, PT Sora Kreatif Indonesia*

Desain

PT Sora Kreatif Indonesia, *Business Unit* Elearning4id.com

Cetakan Pertama

2025

Edisi

Edisi Pertama, 2025

Modul ini disusun berdasarkan pengalaman dan kebutuhan pengetahuan dari pelaksanaan pilot proyek REDD+ *Result-Based Payment* untuk periode hasil 2014-2016 yang merupakan kerja sama antara BPDH, UNDP, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, dan BRGM dengan dukungan pendanaan dari *Green Climate Fund* (GCF). Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan para pihak, memperkuat *Safeguards* Lingkungan, Sosial, dan Gender untuk menerapkan program dalam skema REDD+. Publik dapat mengakses modul pada tautan dan QR code berikut:

<https://bit.ly/ModulREDDRBPGCF>



Modul Pelatihan Kerangka REDD+ dan *Safeguards* Lingkungan, Sosial, dan Gender dapat digunakan untuk mendukung pelatihan pada proyek lain yang mempersyaratkan *safeguards* dalam pelaksanaannya. Modul ini dapat dicetak ulang, atau didistribusikan secara keseluruhan, atau sebagian dengan mencantumkan sumber. Modul ini tidak diperbolehkan untuk dijual kembali atau digunakan untuk tujuan komersial apa pun.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terselesainya **Modul 4: Keterlibatan Pemangku Kepentingan**. Keterlibatan pemangku kepentingan merupakan aspek vital dalam memastikan keberhasilan dan keberlanjutan program REDD+. Oleh karenanya, modul ini menjadi bagian dari rangkaian Modul Pelatihan Kerangka REDD+ dan *Safeguards* Lingkungan, Sosial, dan Gender, pada Proyek Indonesia REDD+ RBP Periode Hasil 2014-2016.

Modul ini membahas konsep dasar, metode identifikasi, serta strategi pengembangan keterlibatan pemangku kepentingan, yang bertujuan untuk menciptakan kolaborasi yang harmonis dan efektif antara berbagai pihak yang terlibat. Di dalamnya juga diuraikan teknik-teknik analisis pemangku kepentingan, strategi komunikasi, serta pendekatan untuk membangun kepercayaan dan mengatasi konflik yang mungkin muncul.

Modul ini diharapkan dapat menjadi panduan praktis bagi para pelaksana skema REDD+, baik di tingkat nasional maupun daerah, dalam mengembangkan rencana tindakan yang tepat dan efektif untuk melibatkan pemangku kepentingan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan modul ini. Semoga modul ini dapat menjadi rujukan yang bermanfaat dan memberikan dampak positif bagi pelaksanaan skema REDD+ di Indonesia.

Selamat belajar dan semoga sukses.





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
DAFTAR AKRONIM	5
GLOSARIUM	6
BAB I PENDAHULUAN	8
A. Latar Belakang	8
B. Indikator Hasil Belajar	8
C. Pokok Bahasan	9
BAB II KONSEP DASAR KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN	10
A. Konsep Dasar dan Pentingnya Keterlibatan Pemangku Kepentingan	10
B. Regulasi dan Kebijakan Terkait Keterlibatan Pemangku Kepentingan	12
BAB III IDENTIFIKASI DAN ANALISIS PEMANGKU KEPENTINGAN	14
A. Teknik dan Metode Identifikasi Pemangku Kepentingan	14
B. Analisis Kebutuhan dan Kepentingan Pemangku Kepentingan	16
C. Matriks Pengaruh dan Kepentingan.....	17
BAB IV STRATEGI KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN	21
A. Pengembangan Strategi Komunikasi	21
B. Membangun Kepercayaan dan Kolaborasi	22
C. Pengelolaan Konflik	22
1. Identifikasi dan Analisa Potensi Konflik.....	23
2. Langkah Mitigasi Konflik	23
3. Studi Kasus Pengelolaan Konflik.....	24
BAB V IMPLEMENTASI DAN PEMANTAUAN KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN	25
A. Rencana Tindakan Keterlibatan	25
B. Pemantauan dan Evaluasi	26
1. Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan	26
2. Indeks Partisipasi	27
3. Analisis Jaringan Sosial	27
BAB VI PENUTUP	29
DAFTAR PUSTAKA	30



DAFTAR AKRONIM

Ditjen PPI	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Perubahan Iklim
FPIC	<i>Free, Prior, and Informed Consent</i>
Kedeputian PPITKNEK	<i>Kedeputian Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon</i>
KLHK	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KPPPA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat.
MA	Masyarakat Adat
MHA	Masyarakat Hukum Adat
NGO	<i>Non-Governmental Organization</i> (LSM dalam konteks internasional)
P3SEKPI	Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial-Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim
PRA	<i>Participatory Rural Appraisal</i>
REDD+	<i>Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, Sustainable Management of Forests and the Conservation and Enhancement of Forest Carbon Stocks in Developing Countries</i>
RACI	<i>Responsible, Accountable, Consulted, Informed</i>
SES	<i>Social and Environmental Standard</i>
SNA	<i>Social Network Analysis</i>
UNFCCC	<i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i>

GLOSARIUM

Identitas Budaya

Seperangkat nilai, norma, tradisi, bahasa, keyakinan, dan praktik yang membedakan suatu kelompok masyarakat dari kelompok lainnya dan yang menjadi dasar bagi individu atau kelompok tersebut dalam mengenali dan mendefinisikan diri mereka sendiri.

Inklusif

Memastikan semua pihak yang terkait atau terdampak oleh suatu proyek atau kebijakan, termasuk kelompok yang sering kali terpinggirkan atau kurang terwakili, diberi kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dan setara dalam proses pengambilan keputusan.

Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Proses interaksi aktif dan partisipatif antara proyek atau organisasi dengan individu atau kelompok yang memiliki kepentingan, pengaruh, atau terkena dampak oleh kegiatan yang dilakukan.

Konflik Kepentingan

Situasi di mana seorang individu, organisasi, atau pihak lain memiliki beberapa kepentingan yang bertentangan, yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk bertindak secara objektif atau untuk memenuhi kewajiban tertentu secara adil.

Konversi Lahan

Proses perubahan penggunaan atau fungsi suatu area lahan dari satu jenis penggunaan ke jenis penggunaan lain.

Legitimasi

Penerimaan, pengakuan, atau dukungan yang diberikan oleh individu, kelompok, atau masyarakat terhadap otoritas, tindakan, keputusan, atau institusi, yang dianggap sah, sesuai, dan dapat dibenarkan.

Masyarakat Marginal/Kelompok Rentan

Kelompok atau individu yang berada di pinggiran kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya dalam suatu masyarakat dan sering kali terpinggirkan atau diabaikan oleh arus utama, dengan akses terbatas terhadap sumber daya, peluang, dan kekuasaan.

Matriks Pengaruh dan Kepentingan

Alat untuk memetakan pemangku kepentingan berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingan mereka terhadap proyek.

Mediasi

Proses intervensi oleh pihak ketiga netral untuk membantu menyelesaikan konflik antara dua atau lebih pihak.

GLOSARIUM

Participatory Rural Appraisal

Metode yang melibatkan masyarakat lokal dalam pengumpulan dan analisis informasi untuk memahami kebutuhan dan perspektif mereka, disingkat PRA.

Pembangunan Ekonomi

Proses peningkatan kapasitas suatu negara atau wilayah untuk menghasilkan dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperbaiki kualitas hidup.

Pemberdayaan Ekonomi Alternatif

Upaya untuk meningkatkan kapasitas ekonomi individu, kelompok, atau komunitas dengan menyediakan peluang dan sumber daya yang berbeda dari aktivitas ekonomi utama mereka.

Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Pendekatan sistematis dan terpadu untuk mengelola hutan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan hutan untuk memenuhi kebutuhan generasi mendatang, disebut juga *Sustainable Forest Management*.

Perlindungan Hutan

Serangkaian tindakan dan kebijakan yang dilakukan untuk menjaga, melestarikan, dan mempertahankan fungsi ekosistem hutan serta keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya.

Program Kehutanan

Inisiatif yang bertujuan untuk konservasi, pengelolaan berkelanjutan, dan restorasi hutan.

Stabilitas Lingkungan

Keadaan di mana ekosistem dan komponennya, seperti tanah, air, udara, flora, dan fauna, berada dalam keseimbangan yang memungkinkan mereka berfungsi secara optimal dan berkelanjutan tanpa mengalami degradasi yang signifikan.

Transparansi

Prinsip keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan pembagian informasi untuk membangun kepercayaan dan legitimasi.

Usaha Ekonomi Berkelanjutan

Suatu bentuk kegiatan ekonomi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam upaya mencapai keberhasilan program kehutanan dan REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, Sustainable Management of Forests and The Conservation and Enhancement of Forest Carbon Stocks in Developing Countries*), keterlibatan pemangku kepentingan merupakan faktor kunci yang tidak dapat diabaikan. Program kehutanan dan REDD+ bertujuan mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan, serta meningkatkan konservasi dan pengelolaan hutan berkelanjutan. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada partisipasi aktif dan kolaborasi dari berbagai pihak terkait (Angelsen et al., 2012).

Pemangku kepentingan, yang meliputi pemerintah, Masyarakat Adat (MA), Masyarakat Hukum Adat (MHA), dan komunitas lokal lainnya, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sektor swasta, donor internasional, serta media, memainkan peran vital dalam setiap tahap perencanaan, implementasi, dan pemantauan program kehutanan dan pelaksanaan skema REDD+. Keterlibatan mereka memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi lokal, serta membantu mengatasi tantangan dan hambatan yang mungkin muncul selama pelaksanaan.

Namun, mengelola keterlibatan pemangku kepentingan memerlukan keterampilan dan strategi yang tepat (Biglaiser & DeRouen, 2019). Pengelolaan ini mencakup proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mengembangkan hubungan dengan pemangku kepentingan. Tanpa keterlibatan yang efektif, program ini berisiko mengalami berbagai kendala, seperti konflik kepentingan, kurangnya dukungan lokal, hingga ketidakpercayaan antara pihak-pihak yang terlibat.

Oleh karena itu, dalam konteks skema REDD+, keterlibatan pemangku kepentingan yang efektif bukan hanya kebutuhan, tetapi juga kunci utama untuk mencapai tujuan lingkungan dan sosial yang lebih besar. Dengan memahami dan mengimplementasikan strategi keterlibatan pemangku kepentingan yang efektif, diharapkan REDD+ ini dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat setempat. Pelatihan ini akan menjadi langkah awal yang penting dalam perjalanan tersebut, memberikan dasar yang kuat bagi peserta untuk terlibat secara aktif dan konstruktif dalam upaya konservasi hutan dan pengurangan emisi gas rumah kaca.

B. Indikator Hasil Belajar

Setelah menyelesaikan modul ini, pembaca diharapkan dapat:

- a) Memahami konsep dasar keterlibatan pemangku kepentingan dalam mendukung keberhasilan program kehutanan dan REDD+;
- b) Mengidentifikasi dan menganalisis Pemangku Kepentingan Kunci berdasarkan data di lapangan;
- c) Menerapkan strategi keterlibatan pemangku kepentingan berdasarkan identifikasi, analisis dan pemetaan kesenjangan; dan
- d) Mengimplementasikan strategi pelibatan dan pemantauan keterlibatan pemangku kepentingan.

C. Pokok Bahasan

Modul 4: Keterlibatan Pemangku Kepentingan ini terdiri dari 6 Bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN memaparkan pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan REDD+ dengan efektif, indikator hasil belajar dan pokok bahasan.

BAB II KONSEP DASAR KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN menjelaskan konsep dasar dan jenis-jenis pemangku kepentingan, serta regulasi dan kebijakan terkait keterlibatan pemangku kepentingan.

BAB III IDENTIFIKASI DAN ANALISIS PEMANGKU KEPENTINGAN menjelaskan langkah identifikasi, analisis dan penilaian pemangku kepentingan berdasarkan kebutuhan, pengaruh dan kepentingan. Metode RACI dan Matriks Pengaruh dan Kepentingan dipaparkan sebagai alat yang dapat digunakan dalam analisis dan penilaian.

BAB IV STRATEGI KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN mengelaborasi strategi komunikasi, pelibatan dan pengelolaan konflik antar pemangku kepentingan. Pembahasan pengelolaan konflik terdiri dari identifikasi dan analisa potensi konflik, langkah mitigasi, dan studi kasus pengelolaan konflik.

BAB V IMPLEMENTASI DAN PEMANTAUAN KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN menguraikan langkah implementasi, pemantauan dan evaluasi keterlibatan pemangku kepentingan. Alat seperti survei kepuasan pemangku kepentingan, indeks partisipasi dan analisis jaringan sosial dipaparkan.

BAB VI PENUTUP memberikan ringkasan umum dari modul ini.



BAB II

KONSEP DASAR KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Indikator hasil belajar

Setelah membaca Bab II, peserta diharapkan dapat memahami konsep dasar keterlibatan pemangku kepentingan dalam mendukung keberhasilan program kehutanan dan REDD+.

Bab ini membahas pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan REDD+ sebagai kunci keberhasilan dan keberlanjutan. Fokus utama mencakup identifikasi pemangku kepentingan, analisis kepentingan, pengaruh, serta kebutuhan mereka, dan pengembangan strategi komunikasi yang efektif. Selain itu, bab ini juga mengulas regulasi dan kebijakan terkait yang menjadi landasan penting dalam pelaksanaan keterlibatan pemangku kepentingan.

A. Konsep Dasar dan Pentingnya Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Keterlibatan pemangku kepentingan adalah proses interaksi aktif dan partisipatif antara proyek atau organisasi dengan individu atau kelompok yang memiliki kepentingan, pengaruh, atau terkena dampak oleh kegiatan yang dilakukan. Dalam rangka meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan, pengelola REDD+ perlu melakukan beberapa langkah kunci. Langkah-langkah ini meliputi:

- Identifikasi pemangku kepentingan,
- Analisis kepentingan dan pengaruh mereka,
- Analisis kebutuhan dan kepentingan mereka, serta
- Pengembangan strategi komunikasi dan kolaborasi yang efektif antara semua pihak yang terlibat atau terdampak oleh proyek atau program tersebut.



Gambar 2.1 Proses Perancangan Peningkatan Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Identifikasi Pemangku Kepentingan

Proses ini dimulai dengan mengidentifikasi siapa saja yang termasuk sebagai pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap hasil proyek, memiliki kekuatan untuk mempengaruhi proyek, atau akan terpengaruh oleh proyek tersebut (Freeman, Harrison, & Wicks, 2010). Dalam konteks REDD+, mereka dapat berada di tingkat tapak, desa, kabupaten, provinsi hingga nasional. Konsultasi dengan organisasi masyarakat sipil yang fokus pada hak-hak perempuan, komite lokal, dan kementerian terkait seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) perlu dilakukan di tahap ini untuk dapat memperkuat identifikasi dan partisipasi perempuan sebagai salah satu pemangku kepentingan yang rentan. Misalnya, norma-norma budaya yang membuat perbedaan gender lebih mencolok atau sulit diinterpretasikan perlu dibahas di tahap ini.

Analisis Kepentingan, Pengaruh, dan Kebutuhan

Pemangku kepentingan yang teridentifikasi dikategorikan berdasarkan kriteria kepentingan dan pengaruh. Alat seperti Matriks Pengaruh dan Kepentingan (*Power/Interest Grid*) sering digunakan untuk mengklasifikasikan pemangku kepentingan menjadi beberapa kategori. Pihak-pihak seperti MA, MHA, masyarakat marginal, dan komunitas lokal lainnya, LSM, atau lembaga pendanaan tentu memiliki pengaruh dan kepentingan yang berbeda-beda sehingga diperlukan analisa dan pemetaan agar program berjalan dengan efektif dan efisien. Kategori dan teknik pemetaan pemangku kepentingan akan dibahas pada Bab berikutnya.

Analisis juga dilakukan untuk menilai kebutuhan dan kepentingan mereka. Analisis pemangku kepentingan ini bertujuan untuk memahami harapan, kebutuhan, dan kekhawatiran setiap pemangku kepentingan. Dampak potensial (positif atau negatif) terhadap pemangku kepentingan dan pengaruh mereka terhadap keberhasilan program juga dianalisis dan dievaluasi. Perlu diingat, bahwa pendekatan gender perlu diintegrasikan dalam proses analisis untuk membantu mengidentifikasi dinamika gender dan ketidaksetaraan dalam partisipasi pemangku kepentingan, serta memberikan wawasan terkait (a) distribusi tugas, kegiatan, dan peran yang terkait dengan pembagian kerja antara perempuan dan laki-laki, serta (b) posisi relatif perempuan dan laki-laki dalam hal representasi, pengaruh, dan pengambilan keputusan.

Pengembangan Strategi Komunikasi

Penerapan pendekatan partisipatif membutuhkan koordinasi lintas sektoral dan komitmen dari berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan yang lebih luas (Leal Filho et al., 2016). Hasil analisis pemangku kepentingan perlu menjadi landasan dalam mengembangkan strategi komunikasi dan pelibatan untuk menjembatani berbagai kepentingan yang ada. Dalam konteks kehutanan dan REDD+, strategi pelibatan ini berarti upaya eksplisit untuk memastikan partisipasi yang luas dan adil tidak hanya dari pemerintah, LSM, sektor swasta, organisasi internasional, dan media, tapi juga perempuan, laki-laki, pemuda, termasuk MA, MHA, masyarakat marginal, dan komunitas lokal lainnya. Partisipasi aktif dilakukan dalam semua tahapan skema REDD+, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi, yang mencakup lebih dari sekedar kehadiran di rapat, tetapi juga peningkatan kapasitas, pertukaran pengetahuan, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Keterlibatan mereka sangat penting dalam memastikan keberhasilan konservasi hutan dan pengurangan emisi secara efektif. Selain itu, keterlibatan pemangku kepentingan yang efektif juga membantu meminimalisir konflik, meningkatkan transparansi, memastikan manfaat program terbagi secara adil, serta memperkuat legitimasi dan keberlanjutan skema REDD+ (Ma, 2020).

Anda dapat merujuk dokumen [UNDP Guidance Note on stakeholder engagement](#) untuk melihat panduan khusus tentang pelibatan pemangku kepentingan.

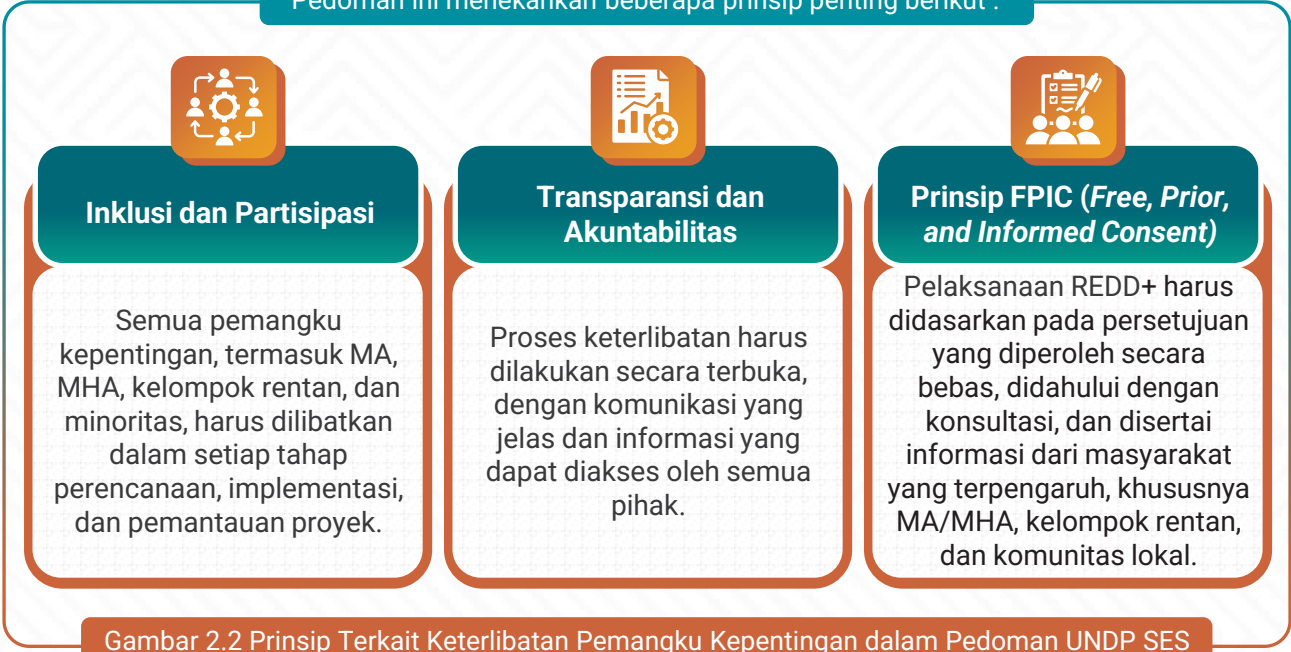


B. Regulasi dan Kebijakan Terkait Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Keterlibatan pemangku kepentingan dalam skema REDD+ diatur dalam kerangka hukum yang menjamin proses ini dapat berjalan efektif dan sesuai standar yang ditetapkan. Memahami regulasi internasional dan nasional terkait keterlibatan pemangku kepentingan menjadi penting dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi, serta memastikan tercapainya tujuan dari pelaksanaan REDD+.

Secara internasional, keterlibatan pemangku kepentingan diakui dalam kerangka Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), khususnya dalam keputusan-keputusan terkait REDD+, serta [Guidance Note UNDP Social and Environmental Standard \(SES\) on Stakeholder Engagement](#). UNDP SES memiliki pedoman dan panduan yang jelas tentang bagaimana memastikan keterlibatan pemangku kepentingan secara efektif dan inklusif dalam program-program yang memiliki dampak sosial dan lingkungan, termasuk REDD+.

Pedoman ini menekankan beberapa prinsip penting berikut :



Gambar 2.2 Prinsip Terkait Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam Pedoman UNDP SES



Di tingkat nasional, keterlibatan pemangku kepentingan dalam REDD+ didasarkan pada berbagai regulasi, di antaranya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. UU No. 32 menekankan “asas partisipatif” dalam setiap proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Asas partisipatif dimaknai bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sementara itu, UU No. 41 mengatur pengelolaan hutan, termasuk kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan, yang sejalan dengan tujuan REDD+ untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

Beberapa poin relevansi UU No. 41 Tahun 1999 dalam konteks REDD+ adalah:

- a) **Pasal 4** menegaskan bahwa negara menguasai sumber daya hutan untuk kemakmuran rakyat, yang membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat setempat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan hutan;
- b) **Pasal 67** mengakui hak-hak MHA atas hutan, sehingga keterlibatan MHA dalam skema REDD+ menjadi bagian integral dari pelaksanaan kebijakan kehutanan; dan
- c) **Pasal 68** menyebutkan kewajiban masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan, yang mendukung prinsip partisipasi masyarakat dalam program-program konservasi seperti REDD+.

Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Kehutanan, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.70 tahun 2017 terkait tata kelola REDD+ juga relevan sebagai payung hukum nasional dalam keterlibatan pemangku kepentingan dalam skema REDD+. Kedua regulasi ini memastikan adanya proses partisipatif yang melibatkan semua pemangku kepentingan, mulai dari masyarakat setempat hingga pemerintah pusat.

Regulasi keterlibatan pemangku kepentingan lainnya dapat disesuaikan dengan isu yang lebih spesifik dan/atau terkait beberapa direktorat tertentu yang terlibat dalam pelaksanaan REDD+. Contohnya, kebijakan terkait isu perdagangan karbon dalam pelaksanaan REDD+ dapat merujuk pada Perpres No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon. Contoh lainnya, pelaksanaan REDD+ di wilayah perhutanan sosial dapat merujuk Permen LHK No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Setiap kebijakan yang diterapkan ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mencapai tujuan REDD+ yang berkelanjutan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari berbagai tingkat pemerintahan dan sektor terkait.



BAB III

IDENTIFIKASI DAN ANALISIS PEMANGKU KEPENTINGAN

Indikator hasil belajar

Setelah membaca Bab III peserta diharapkan dapat mengidentifikasi dan menganalisis Pemangku Kepentingan Kunci berdasarkan data di lapangan.

Bab ini menguraikan berbagai teknik dan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan REDD+. Setelah pemangku kepentingan diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menganalisis kebutuhan dan kepentingan mereka, yang akan membantu memahami peran serta harapan mereka terhadap proyek. Bab ini juga memperkenalkan Matriks Pengaruh dan Kepentingan sebagai alat analisis untuk memetakan kekuatan dan pengaruh setiap pemangku kepentingan. Sebagai penutup, akan disajikan studi kasus di Kalimantan Tengah untuk memberikan gambaran nyata tentang penerapan analisis pemangku kepentingan dalam konteks lokal.

A. Teknik dan Metode Identifikasi Pemangku Kepentingan

Salah satu metode yang populer untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan adalah Metode Analisis Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Analysis*). Teknik ini melibatkan pemetaan individu atau kelompok yang memiliki pengaruh atau terpengaruh oleh pelaksanaan skema REDD+, dan mengkategorikan mereka berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruh mereka, yaitu:

- Pemangku Kepentingan Utama:** Mereka yang langsung terpengaruh oleh kegiatan REDD+ (seperti MA, MHA, masyarakat marginal, dan komunitas lokal lainnya);
- Pemangku Kepentingan Sekunder:** Mereka yang memiliki kepentingan dalam program tetapi tidak langsung terpengaruh (misalnya lembaga pemerintahan, LSM, sektor swasta, dan media); dan
- Pemangku Kepentingan Kunci:** Mereka yang memiliki pengaruh atau otoritas signifikan atas program (misalnya, pembuat kebijakan, lembaga pendanaan).



Gambar 3.1 Kategori Pemangku Kepentingan

Pemetaan pemangku kepentingan dapat dilakukan dengan melakukan identifikasi terlebih dahulu melalui berbagai cara seperti:

- a) Sesi *brainstorming* antara tim proyek, pakar lokal, dan pihak terkait lainnya untuk mendorong berbagai perspektif,
- b) Tinjauan dokumen terkait, serta
- c) Pertemuan diskusi dan/atau wawancara dengan komunitas lokal.

Bentuk kegiatan identifikasi ini juga bisa berupa diskusi kelompok terbuka, pembuatan peta pikiran (*mind mapping*), dan pengelompokan ide berdasarkan kategori tertentu. Beberapa aspek kunci berikut penting untuk dibahas dalam sesi identifikasi:



Gambar 3.2 Aspek Kunci Pembahasan dalam Sesi Identifikasi

Pembahasan masih bisa dikembangkan atau difokuskan di beberapa topik kunci saja. Namun, penting untuk diingat bahwa proses pelibatan pemangku kepentingan ini juga harus memperhatikan kesetaraan gender dan pelibatan perempuan, sejak tahap identifikasi pemangku kepentingan, analisa, implementasi pelibatan hingga pemantauannya. Hal ini dilakukan dengan memastikan adanya pedoman dan indikator penerapan yang spesifik dan responsif gender. Dengan mengintegrasikan pendekatan gender, risiko kesenjangan gender dalam partisipasi dan pengambilan keputusan diharapkan dapat diatasi.

Informasi lebih lanjut tentang inklusi Gender dapat Anda temukan di Modul 5

Berikut adalah contoh pertanyaan untuk digunakan dalam wawancara atau *brainstorming* sebagai pemantik diskusi awal dalam mengidentifikasi pemangku kepentingan dalam mekanisme REDD+:

1. **Siapa saja pihak yang terlibat atau terdampak langsung oleh skema ini?** (Contoh: pemerintah, MA, MHA, masyarakat marginal, dan komunitas lokal lainnya, LSM, perusahaan, dll.)
2. **Apa saja perkiraan dampak yang mungkin Anda/mereka dapat?**
3. **Bagaimana keterlibatan Anda/mereka dalam pelaksanaan skema REDD+?**
4. **Apa saja dan seberapa besar kepentingan Anda/mereka terhadap pelaksanaan REDD+ ini?** (Contoh: melindungi lingkungan, memperoleh manfaat ekonomi, dll.)
5. **Apa saja dan seberapa besar pengaruh Anda/mereka dalam keberhasilan pelaksanaan skema REDD+ ini?** (Contoh: regulasi, pendanaan, partisipasi masyarakat, dll.)
6. **Bagaimana Anda melihat interaksi dan relasi antara Anda/mereka dengan para pemangku kepentingan lainnya? dan bagaimana bentuk hubungannya, apakah saling mendukung atau bertentangan?** (Contoh: kolaborasi, konflik, ketergantungan, dll.)
7. **Apa saja risiko konflik yang menurut Anda mungkin muncul dari relasi dan keterlibatan pemangku kepentingan ini? Misalnya, apakah ada potensi sengketa lahan, tumpang tindih kepentingan, atau masalah dalam distribusi manfaat?**
8. **Apa ekspektasi Anda/mereka terhadap hasil pelaksanaan REDD+? Bagaimana ekspektasi tersebut memengaruhi cara Anda/mereka terlibat dalam proyek?**
9. **Bagaimana tingkat dukungan atau penolakan yang Anda lihat dari setiap pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan REDD+ ini?**

Kuesioner ini membantu dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk memetakan pemangku kepentingan dan potensi risiko konflik yang mungkin muncul. Ide-ide yang dihasilkan kemudian dianalisis dan digunakan untuk menyusun daftar pemangku kepentingan, yang hasilnya ditinjau dan disepakati bersama oleh peserta. Penting juga untuk diperhatikan bahwa setiap lembaga/kelompok pemangku kepentingan memiliki strukturnya (kebijakan dan/atau kerangka kerja) masing-masing yang menentukan bagaimana setiap individu di antara mereka dapat berperan dan berinteraksi.



B. Analisis Kebutuhan dan Kepentingan Pemangku Kepentingan

Salah satu metode yang terkenal untuk menganalisis kebutuhan dan kepentingan pemangku kepentingan adalah Metode RACI (*Responsible, Accountable, Consulted, Informed*). Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi peran pemangku kepentingan dalam pelaksanaan skema REDD+ berdasarkan tanggung jawab (*Responsible*), akuntabilitas (*Accountable*), konsultasi (*Consulted*), dan informasi (*Informed*). Dengan kata lain, metode ini membantu menentukan siapa yang bertanggung jawab atas tugas tertentu, siapa yang memiliki akuntabilitas, siapa yang perlu diajak berkonsultasi, dan siapa yang harus diinformasikan mengenai berbagai aspek dalam pelaksanaan REDD+.

Dengan menggunakan Matriks RACI, pengelola REDD+ dapat memahami peran dan kepentingan masing-masing pemangku kepentingan, serta bagaimana kebutuhan mereka dapat diakomodasi. Penting juga untuk melihat perbedaan peran, hak, tanggung jawab, pengetahuan, serta pengalaman perempuan, laki-laki, dan pemuda terkait hutan, sehingga



potensi hambatan sosial-ekonomi, politik, dan budaya (seperti tingkat literasi yang lebih rendah, kurangnya kemampuan berbicara terbuka dalam pertemuan) yang membatasi partisipasi setara kelompok rentan dalam konsultasi dan pengambilan keputusan dapat teridentifikasi. Matriks RACI memetakan tugas-tugas dan keputusan penting dalam pelaksanaan skema REDD+ ke dalam empat kategori, yaitu:

	Orang atau kelompok yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas tertentu . Mereka adalah pihak yang langsung terlibat dalam pekerjaan dan bertanggung jawab untuk menyelesaikannya.
	Orang atau kelompok yang memiliki otoritas akhir untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas hasil akhir . Meskipun mereka mungkin tidak melakukan tugas secara langsung, mereka bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan tugas tersebut.
	Orang atau kelompok yang memberikan masukan dan saran sebelum keputusan diambil atau tugas dilakukan . Mereka diajak berkonsultasi untuk memberikan perspektif yang relevan atau keahlian khusus yang diperlukan.
	Orang atau kelompok yang perlu diberi informasi tentang kemajuan, keputusan, atau hasil dari tugas tertentu . Mereka tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan atau pengambilan keputusan, tetapi perlu diberi informasi secara berkala.

Gambar 3.3 Matriks RACI



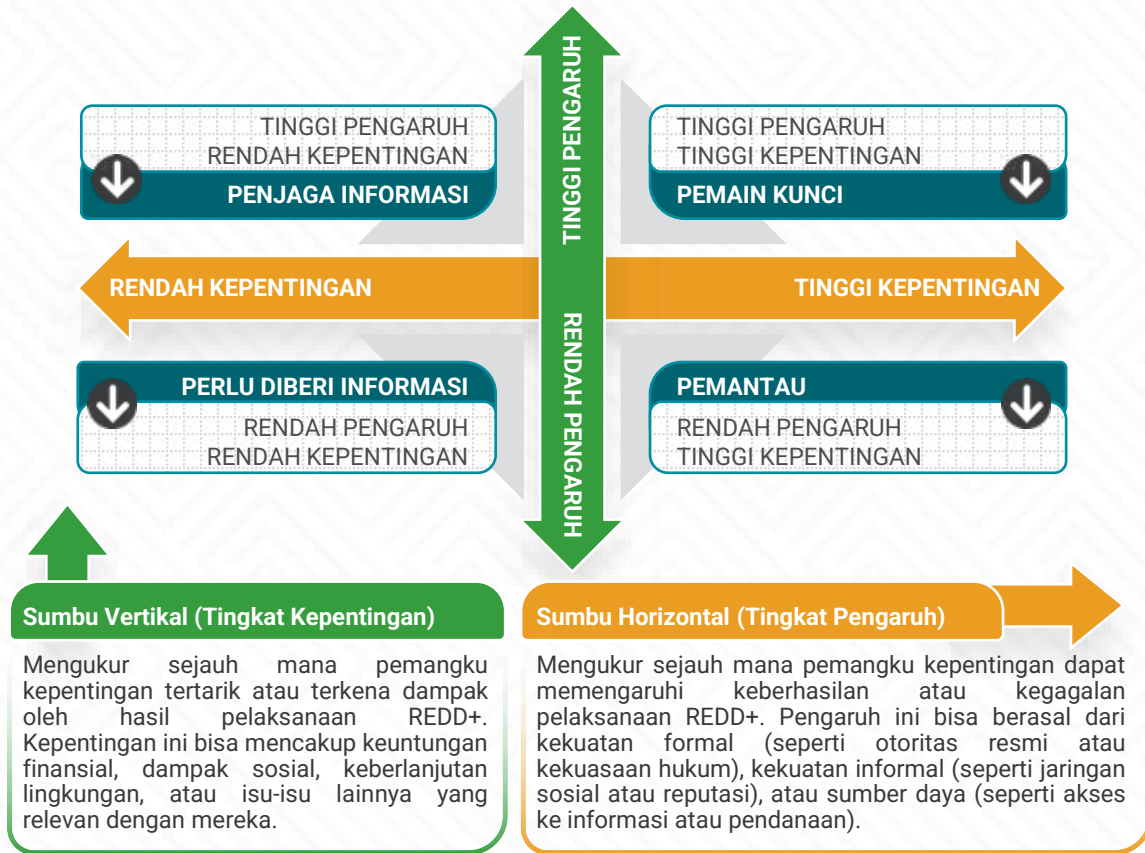
Anda dapat melihat contoh pengisian Matriks RACI pada dokumen lampiran 4.1 pada tautan atau *barcode* berikut: <https://bit.ly/lampiranmodul4>

C. Matriks Pengaruh dan Kepentingan

Setelah pemangku kepentingan teridentifikasi, mereka dinilai berdasarkan pengaruh dan kepentingannya terhadap pelaksanaan skema REDD+. Penilaian ini dilakukan oleh tim yang terdiri dari berbagai ahli, termasuk akademisi, regulator, dan praktisi. Proses ini sangat penting untuk menentukan posisi pemangku kepentingan, apakah mereka termasuk dalam kelompok yang terkena dampak langsung atau tidak. Dengan penilaian yang tepat, strategi komunikasi dapat dirancang untuk menjadi lebih tepat sasaran dan efektif (Biglaiser & DeRouen, 2019). Pada proses ini, anggota tim proyek perlu menyadari konteks budaya dan berbagai hambatan (geografis, fisik, sikap, informasi, dan komunikasi) yang dapat mengganggu partisipasi setara di antara kelompok pemangku kepentingan yang berbeda serta bagaimana kenyataan ini berperan dalam pengaruh dan kepentingan mereka dalam suatu proyek.

Sebagai contoh, perempuan dan laki-laki mungkin memiliki kemampuan dan pengaruh yang berbeda. Perempuan mungkin memainkan peran kunci, tetapi memiliki tingkat literasi dan akses yang rendah. Untuk mengatasinya, informasi proyek dapat disebarluaskan melalui berbagai media, termasuk pemberitahuan, brosur, pengumuman di forum komunitas, hari pasar, dan teks berbasis gambar (untuk membantu mereka yang tidak dapat membaca) (UNDP, 2022).

Setelah penilaian pengaruh dan kepentingan dilakukan, data tersebut dipetakan menggunakan Matriks Pengaruh dan Kepentingan dalam kuadran yang terdiri dari dua sumbu berikut:



Gambar 3.4 Matriks Pengaruh dan Kepentingan



Pemain Kunci (Tinggi Pengaruh, Tinggi Kepentingan)

Pemangku kepentingan dalam kuadran ini memiliki pengaruh signifikan dan sangat tertarik dengan hasil pelaksanaan REDD+. Mereka bisa berupa pejabat pemerintah, pemimpin komunitas, atau investor utama. Strategi keterlibatan meliputi kolaborasi aktif, konsultasi terus-menerus, dan memastikan mereka terlibat dalam pengambilan keputusan utama. Kementerian Kehutanan (Kemenhut), yang memiliki kekuasaan untuk menetapkan kebijakan dan regulasi terkait hutan termasuk ke dalam kategori Pemain Kunci.



Penjaga Informasi (Tinggi Pengaruh, Rendah Kepentingan)

Pemangku kepentingan ini memiliki pengaruh besar tetapi minat atau kepentingan mereka terhadap pelaksanaan REDD+ relatif rendah. Mereka bisa menjadi eksekutif perusahaan atau pemimpin organisasi yang tidak langsung terlibat. Strategi keterlibatan meliputi menjaga komunikasi terbuka, memberikan informasi rutin, dan melibatkan mereka dalam isu-isu kritis yang memerlukan pengaruh mereka.



Pemantau (Rendah Pengaruh, Tinggi Kepentingan)

Pemangku kepentingan dalam kuadran ini memiliki kepentingan tinggi terhadap hasil pelaksanaan REDD+ tetapi pengaruh mereka terbatas. Mereka bisa berupa anggota masyarakat, kelompok lingkungan, atau pengguna akhir. Strategi keterlibatan yang efektif meliputi komunikasi yang teratur, pemberian informasi yang jelas, dan melibatkan mereka dalam konsultasi untuk memastikan kebutuhan mereka terpenuhi (Biglaiser & DeRouen, 2019).



Pihak yang Harus Diberi Informasi (Rendah Pengaruh, Rendah Kepentingan)

Pemangku kepentingan ini memiliki pengaruh dan kepentingan yang rendah terhadap pelaksanaan REDD+. Mereka bisa berupa pihak-pihak yang hanya perlu mengetahui perkembangan umum pelaksanaan REDD+ tanpa terlibat langsung. Strategi keterlibatan meliputi pemberian informasi berkala melalui laporan atau berita pelaksanaan REDD+, memastikan mereka tetap diberi informasi tanpa harus terlalu sering dilibatkan. LSM kecil yang terlibat dalam kampanye kesadaran lingkungan adalah salah satu contoh pihak untuk kategori ini. Mereka harus diberi informasi namun tidak memiliki peran langsung dalam pelaksanaan REDD+.

Agar lebih mudah dipahami, simaklah contoh tabel matriks penilaian berikut ini:

Tabel 3.1 Contoh Matriks Penilaian Pemangku Kepentingan

Pemangku Kepentingan	Pengaruh	Kepentingan	Kategori	Strategi Keterlibatan
Kementerian Lingkungan Hidup	Tinggi	Tinggi	Pemain Kunci	Kolaborasi aktif, terlibat dalam pengambilan keputusan utama
Eksekutif Perusahaan	Tinggi	Rendah	Penjaga Informasi	Informasi rutin, libatkan dalam isu kritis
MA/MHA, kelompok rentan, dan komunitas lokal lainnya	Rendah	Tinggi	Pemantau	Komunikasi teratur, konsultasi untuk memastikan kebutuhan terpenuhi
LSM Kecil	Rendah	Rendah	Mereka yang Diberi Informasi	Laporan berkala, pemberian informasi umum



Anda dapat melihat hasil Matriks penilaian pemangku kepentingan pada dokumen lampiran 4.2 pada tautan atau *barcode* berikut <https://bit.ly/lampiranmodul4>





Studi Kasus: Analisis Pemangku Kepentingan di Kalimantan Tengah

Kalimantan Tengah dengan hutan yang luas dan kaya akan keanekaragaman hayati merupakan salah satu provinsi yang menghadapi tekanan signifikan dari deforestasi dan degradasi hutan. Berdasarkan data terbaru, luas hutan di Kalimantan Tengah sekitar 12 juta hektar (Data Badan Pusat Statistik, 2022), yang mencakup sekitar 78% dari total luas provinsi. Persentase ini terus berubah seiring waktu karena berbagai faktor, seperti konversi lahan dan kebakaran hutan. Sebagai bagian dari program REDD+, Kalimantan Tengah menyoroti berbagai aspek kritis dalam analisis kebutuhan dan kepentingan pemangku kepentingan yang beragam.

Sebagai contoh, MHA di wilayah tersebut memiliki kepentingan besar dalam konservasi hutan, yang tidak hanya menjadi sumber mata pencaharian, tetapi juga identitas budaya mereka. Dengan pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA), para peneliti dan fasilitator mengadakan diskusi kelompok terarah dan pemetaan partisipatif dengan MHA untuk memahami kebutuhan mereka. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan:



Kebutuhan Masyarakat

- Perlindungan hutan
- Pemberdayaan ekonomi alternatif



Kepentingan Pemerintah Daerah

- Menjaga stabilitas lingkungan
- Mempromosikan Pembangunan ekonomi



Kepentingan Perusahaan Swasta

- Mencari kepastian hukum dan operasional dalam aktivitas mereka

Gambar 3.5 Contoh Hasil PRA Kalimantan Tengah

Analisis ini membantu mengembangkan strategi yang holistik dan inklusif untuk keterlibatan pemangku kepentingan dalam implementasi skema REDD+ di Kalimantan Tengah.

Di tingkat nasional, komitmen Pemerintah Indonesia terhadap REDD+ ditunjukkan dengan pembentukan berbagai lembaga pendukung, seperti Direktorat Jenderal Perubahan Iklim (Ditjen PPI) pada tahun 2015, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi, Kebijakan, dan Perubahan Iklim (P3SEKPI) pada tahun 2015 dan Kedeputusan Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon (Kedeputusan PPITKNEK) pada tahun 2025. Di tingkat daerah, sejumlah lembaga juga dibentuk untuk mengimplementasikan program REDD+, termasuk Komisi Daerah REDD+ Kalimantan Tengah, Pokja Perubahan Iklim Sumatera Selatan, Komisi Daerah REDD+ Jambi, dan Dewan Perubahan Iklim Kalimantan Timur.



BAB IV

STRATEGI KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN

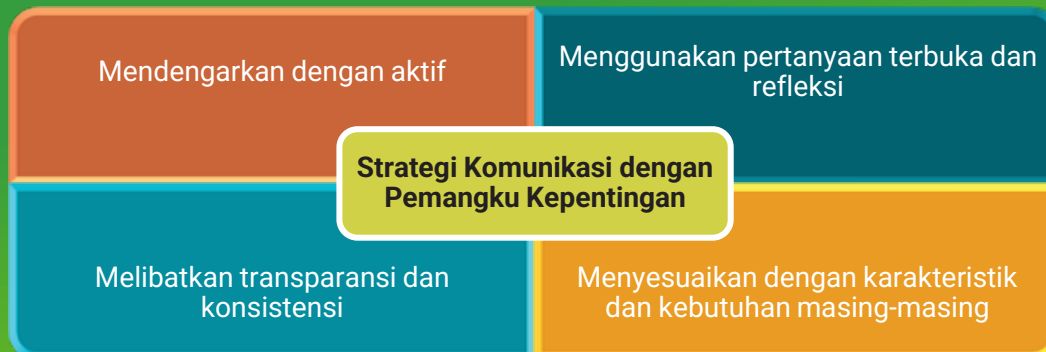
Indikator hasil belajar

Setelah membaca Bab IV peserta diharapkan dapat menerapkan strategi keterlibatan pemangku kepentingan berdasarkan identifikasi, analisis, dan pemetaan kesenjangan

Bab ini membahas pengembangan strategi komunikasi yang efektif untuk membangun kepercayaan dan kolaborasi antara pemangku kepentingan dalam pelaksanaan REDD+. Selain itu, bab ini juga menguraikan cara mengelola konflik melalui identifikasi dan analisis potensi konflik, langkah-langkah mitigasi yang tepat, serta studi kasus pengelolaan konflik di lapangan. Pendekatan ini bertujuan memastikan hubungan yang harmonis dan produktif di antara semua pihak yang terlibat.

A. Pengembangan Strategi Komunikasi

Teknik komunikasi yang efektif dalam keterlibatan pemangku kepentingan mencakup pendekatan mendengarkan secara aktif, di mana penting untuk tidak hanya mendengar kata-kata yang diucapkan tetapi juga memahami makna di baliknya. Selain itu, penggunaan pertanyaan terbuka dan refleksi membantu memperjelas pemahaman dan membangun hubungan yang lebih dekat dengan pemangku kepentingan. Teknik ini didukung oleh teori komunikasi interpersonal yang menekankan pentingnya empati, kesabaran, dan kejelasan dalam menyampaikan informasi.



Gambar 4.1 Strategi Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan

Praktik terbaik dalam berkomunikasi dengan pemangku kepentingan juga melibatkan transparansi dan konsistensi dalam penyampaian informasi. Ini berarti memberikan informasi secara jelas dan tepat waktu kepada semua pihak yang terlibat, serta menjaga konsistensi dalam pesan yang disampaikan untuk menghindari ambiguitas atau kesalahpahaman. Selain itu, menyesuaikan komunikasi dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing pemangku kepentingan dapat membantu membangun hubungan yang lebih kuat dan saling menguntungkan. Praktik ini didukung oleh teori manajemen hubungan dengan pemangku kepentingan (Pretty, 1995) yang menekankan pentingnya menjaga hubungan yang positif dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam proses ini, pertimbangkan berbagai bentuk komunikasi agar dapat mengatasi hambatan yang mungkin dihadapi pemangku kepentingan, terutama yang terpinggirkan, dalam memperoleh informasi proyek dan berpartisipasi.

Contoh bentuk komunikasi tersebut antara lain: lembar fakta, selebaran, pengumuman komunitas, siaran pers, buletin, *hotline*, grafik, representasi lisan, poster, rapat publik, pertemuan informal, video, media elektronik (situs *web*, pesan SMS), radio komunitas, drama lokal, dan peran penghubung (pemuka adat, tokoh agama, pendukung LSM) (UNDP, 2022).

B. Membangun Kepercayaan dan Kolaborasi

Strategi yang efektif untuk membangun kepercayaan di antara berbagai pemangku kepentingan dalam program kehutanan dan REDD+ mencakup transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Dengan memberikan akses terbuka terhadap informasi dan memastikan bahwa semua pihak merasa kepentingan mereka diperhatikan secara adil, kepercayaan dapat dibangun lebih kuat. Selain itu, konsistensi dalam perilaku dan komunikasi sangat penting untuk membangun kepercayaan jangka panjang. Pendekatan ini didasarkan pada teori kepercayaan organisasional dan psikologi sosial yang menekankan pentingnya integritas dan komitmen dalam interaksi antara individu dan kelompok.

Sebuah studi kasus yang relevan adalah kolaborasi antara pemerintah dan MHA dalam pengelolaan hutan. Pelaksanaan REDD+ di Amerika Latin menunjukkan, keberhasilan program sangat bergantung pada adaptasi terhadap kondisi lokal dan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, MHA, dan organisasi non-pemerintah (NGO) (Larson & Pacheco, 2016). Misalnya, di wilayah Amazon di Brazil, pemerintah bekerja sama dengan suku-suku pribumi untuk melindungi hutan mereka dari deforestasi ilegal dan membantu mereka mengembangkan usaha ekonomi berkelanjutan seperti pariwisata ekologis dan penanaman kembali hutan. Kolaborasi ini didasarkan pada saling pengertian, kesepahaman atas tujuan bersama, dan pembagian tanggung jawab yang adil—semua ini merupakan pondasi dari kepercayaan yang terbangun seiring waktu. Studi kasus ini menunjukkan bahwa dengan membangun hubungan yang inklusif dan saling menguntungkan, pemerintah dan MHA dapat mencapai hasil yang lebih baik dalam menjaga keberlanjutan hutan dan lingkungan hidup (Reed & McDonald, 2016).

C. Pengelolaan Konflik

Secara etimologis, konflik merujuk pada pertentangan, perkelahian, atau perselisihan tentang pendapat atau keinginan yang berbeda antara individu atau kelompok. Dalam konteks pelaksanaan REDD+, konflik dapat terjadi akibat perbedaan pendapat atau keinginan antara pemberi skema, pelaksana skema, dan masyarakat sekitar yang terdampak pelaksanaan skema. Risiko konflik semacam ini perlu diidentifikasi lebih awal agar dapat dicegah atau diminimalkan, dan konflik yang terjadi perlu segera diatasi dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan.

Pendekatan yang holistik dan berkelanjutan diperlukan dalam mengatasi konflik antar pemangku kepentingan. Ini mencakup identifikasi akar permasalahan, memastikan adanya komunikasi yang terbuka, melibatkan semua pihak secara inklusif, serta menggunakan mediasi dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan. Selain itu, penting untuk memperkuat kapasitas pihak-pihak terkait, membangun mekanisme penyelesaian konflik yang jelas, dan melakukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa solusi yang diterapkan tetap relevan dan efektif.

1. Identifikasi dan Analisa Potensi Konflik

Identifikasi dan analisa potensi risiko konflik menjadi langkah awal yang penting untuk mengantisipasi hambatan di masa depan. Identifikasi potensi konflik dapat dilakukan melalui pemetaan pemangku kepentingan yang jelas. Pemetaan tersebut akan menggambarkan siapa saja pihak yang terlibat atau terdampak oleh pelaksanaan REDD+, seperti pemerintah, perusahaan, MA/MHA, masyarakat marginal, dan komunitas lokal lainnya, serta LSM. Konflik sering muncul ketika kepentingan dan kebutuhan pihak-pihak tersebut berbenturan, misalnya ketika masyarakat kehilangan akses ke hutan atau sumber daya alam yang mereka andalkan.



Informasi lebih lanjut tentang identifikasi risiko sosial seperti konflik dapat Anda temukan di Modul 10, sementara informasi tentang pengelolaan dampak sosial dapat Anda temukan di Modul 11.

Analisa sumber konflik juga tidak kalah penting. Beberapa faktor utama yang dapat memicu konflik antara lain:

Kepentingan Ekonomi



Perusahaan mungkin fokus pada eksploitasi sumber daya, sementara masyarakat ingin melindungi lingkungan dan mata pencaharian mereka.

Hak atas Tanah



Sengketa terkait kepemilikan atau akses terhadap lahan adalah isu krusial, terutama di kawasan hutan yang dihuni oleh MA/MHA, masyarakat marginal, dan komunitas lokal lainnya.

Kebijakan Pemerintah



Regulasi pemerintah yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat bisa memicu perlawanan dan protes.

Partisipasi yang Tidak Merata



Kurangnya partisipasi aktif MA/MHA, masyarakat marginal, dan komunitas lokal lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan skema REDD+ dapat menyebabkan penolakan terhadap kegiatan-kegiatan REDD+ karena mereka merasa tidak terlibat dalam pengambilan keputusan.

2. Langkah Mitigasi Konflik

Strategi mitigasi konflik dibuat berdasarkan hasil analisa potensi risiko konflik. Pertama, langkah mitigasi konflik bisa berupa dialog terbuka antara pihak yang berkepentingan, baik dari institusi pemerintah maupun NGO, untuk mendorong komunikasi yang transparan dan partisipatif. Dialog terbuka yang mengedepankan mediasi dan penerapan pendekatan partisipatif juga bisa dilakukan untuk meredakan ketegangan dan menjembatani kepentingan berbagai pihak.

Kedua, sosialisasi dan konsultasi yang memadai dengan pemangku kepentingan utama juga penting untuk membantu menciptakan keseimbangan antara pencapaian tujuan REDD+ dan perlindungan hak-hak MA/MHA, kelompok rentan dan komunitas lokal, sehingga konflik dapat dikelola secara adil dan transparan (Moeliono, Wollenberg, & Limberg, 2009).

Ketiga, dengan analisis potensi risiko konflik yang tepat, upaya mitigasi dan strategi kolaboratif dapat diterapkan lebih awal untuk menghindari konflik yang lebih besar sehingga pelaksanaan REDD+ bisa berjalan lancar tanpa mengorbankan prinsip keadilan sosial dan lingkungan.

Keempat, pemenuhan *safeguards* dalam REDD+ juga berperan krusial untuk melindungi hak-hak MA, MHA masyarakat marginal, dan komunitas lokal lainnya, serta memastikan bahwa keuntungan program REDD+ didistribusikan secara adil (Innes et al., 2014). Selain itu, untuk mengatasi konflik-konflik tersebut, pendekatan yang inklusif harus diambil sejak tahap awal, dengan menghormati hak-hak adat dan memperkuat kelembagaan lokal melalui berbagai metode seperti mediasi, diskusi, dan pemberdayaan masyarakat (Colfer, 2006).

Anda dapat melihat contoh rencana pelibatan pemangku kepentingan pada dokumen lampiran 4.3 pada tautan atau *barcode* berikut <https://bit.ly/lampiranmodul4>



Studi Kasus Pengelolaan Konflik

Indonesia memiliki hutan seluas sekitar 92,7 juta hektar pada tahun 2021, yang terdiri dari hutan primer, hutan sekunder, dan hutan produksi. Dengan luas hutan yang begitu signifikan, konflik antara pemangku kepentingan sering kali terjadi, terutama dalam program-program kehutanan. Menurut artikel dari Mongabay (2024), konflik lahan di Indonesia sering kali muncul akibat tumpang tindih kepentingan antara pemerintah, perusahaan, MA/MHA, dan masyarakat setempat lainnya, terutama di kawasan hutan. Banyak kasus yang melibatkan pengusuran MA/MHA dan masyarakat setempat lainnya oleh perusahaan, terutama di sektor perkebunan sawit dan proyek infrastruktur nasional. Konflik-konflik ini diperburuk oleh kebijakan pemerintah yang memprioritaskan investasi dan pembangunan, yang sering kali mengesampingkan hak-hak masyarakat setempat.

Salah satu studi kasus konflik yang relevan dengan implementasi skema REDD+ terjadi di Kalimantan Tengah. Konflik ini melibatkan berbagai pihak seperti:

- a) **MA/MHA:** Terdiri dari berbagai suku Dayak yang bergantung pada hutan untuk mata pencaharian, budaya, dan identitas mereka.
- b) **Masyarakat Lokal Lainnya:** Terdiri dari berbagai masyarakat lokal yang terdampak di luar MA/MHA, seperti perempuan, difabel, pemuda masyarakat miskin, masyarakat transmigran, masyarakat perbauran antar etnis, dan lainnya.
- c) **Pemerintah:** Pemerintah daerah dan pusat yang bertanggung jawab atas kebijakan kehutanan dan pelaksanaan program REDD+.
- d) **LSM:** Organisasi non-pemerintah yang fokus pada konservasi lingkungan dan hak-hak MHA.
- e) **Perusahaan Swasta:** Perusahaan yang terlibat dalam industri kehutanan, seperti perusahaan sawit dan kayu, yang memiliki kepentingan ekonomi di kawasan tersebut.

Konflik yang muncul mencakup berbagai isu seperti sengketa hak kepemilikan tanah akibat ketidakjelasan kepemilikan, penggunaan lahan oleh perusahaan sawit dan kayu, serta kurangnya keterlibatan dan partisipasi MA/MHA, masyarakat marginal, dan komunitas lokal lainnya dalam pengambilan keputusan, yang sering kali menimbulkan ketidakadilan dan kecurigaan.

Studi kasus konflik pemangku kepentingan dalam program REDD+ di Kalimantan Tengah menunjukkan pentingnya pendekatan yang inklusif dan berbasis hak dalam pengelolaan hutan. Melalui mediasi, dialog, dan partisipasi aktif masyarakat, konflik dapat dikelola dan diatasi, sehingga menghasilkan manfaat yang berkelanjutan bagi semua pihak.



BAB V

IMPLEMENTASI DAN PEMANTAUAN KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Indikator hasil belajar

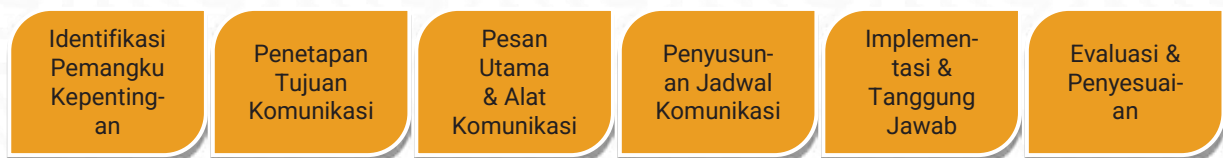
Setelah membaca Bab IV peserta, diharapkan dapat mengimplementasikan strategi pelibatan dan pemantauan keterlibatan pemangku kepentingan

Bab ini menguraikan langkah-langkah dalam merancang rencana tindakan keterlibatan pemangku kepentingan yang efektif dalam pelaksanaan REDD+. Selain itu, bab ini juga membahas pentingnya pemantauan dan evaluasi melalui survei kepuasan pemangku kepentingan, pengukuran indeks partisipasi, serta penggunaan analisis jaringan sosial untuk memahami pola interaksi dan kolaborasi di antara para pihak. Tujuan utamanya adalah memastikan keterlibatan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat, termasuk MA, MHA, kelompok rentan seperti perempuan, difabel, pemuda, kelompok miskin, dan masyarakat lokal lainnya.

A. Rencana Tindakan Keterlibatan

Menyusun rencana aksi keterlibatan pemangku kepentingan adalah proses yang sistematis untuk merencanakan dan mengimplementasikan strategi komunikasi, interaksi, dan keterlibatan dengan berbagai pemangku kepentingan. Salah satu pendekatan yang sering digunakan adalah Kerangka Rencana Aksi Komunikasi (*Communication Action Plan Framework*). Pendekatan ini mencakup langkah-langkah penting yang membantu mengarahkan upaya komunikasi agar lebih terfokus dan efektif, serta memastikan semua pihak yang terlibat mendapatkan informasi yang tepat pada waktu yang tepat.

Gambar 5.1 Elemen dalam *Communication Action Plan Framework*



Rencana aksi yang efektif memerlukan pendekatan yang terstruktur dan menyeluruh. Dengan mengidentifikasi pemangku kepentingan utama, menetapkan tujuan keterlibatan, merumuskan pesan yang relevan dan jelas, menentukan alat komunikasi yang tepat, serta mengatur jadwal dan evaluasi, pelaksana REDD+ dapat memastikan upaya komunikasi dan keterlibatan lebih terarah dan efektif. Rencana ini tidak hanya memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan REDD+ secara keseluruhan.

Rencana ini juga mencakup upaya pelibatan pemangku kepentingan dan pemantau pihak ketiga dalam pemantauan pelaksanaan proyek, dampak potensial, dan langkah pengelolaan/mitigasi. Rencana ini perlu menjelaskan bagaimana dan kapan hasil dari kegiatan pelibatan pemangku kepentingan akan dilaporkan kembali kepada kelompok yang terdampak proyek dan pemangku kepentingan yang lebih luas. Contohnya melalui buletin, laporan penilaian sosial dan lingkungan, serta laporan pemantauan (UNDP, 2022).



B. Pemantauan dan Evaluasi





Dalam rangka memastikan efektivitas keterlibatan pemangku kepentingan dalam program kehutanan dan REDD+, pengumpulan data partisipatif adalah metode yang umum digunakan. Metode ini melibatkan pemangku kepentingan secara langsung dalam proses pemantauan, dengan cara melibatkan mereka dalam **pengumpulan informasi terkait tingkat kepuasan, pemahaman, dan partisipasi mereka dalam kegiatan program**. Pendekatan ini tidak hanya menghasilkan data yang lebih akurat tetapi juga meningkatkan transparansi dan legitimasi proses keterlibatan. Pemangku kepentingan yang dilibatkan merasa memiliki andil dalam pelaksanaan REDD+, sehingga lebih mungkin mendukung dan berpartisipasi aktif dalam implementasi dan pemantauannya (Fischer dan Blüthgen, 2019).

Dalam konteks pemantauan dan evaluasi keterlibatan pemangku kepentingan, pelaksana REDD+ perlu menerjemahkan tingkat kepuasan, pemahaman, dan partisipasi menjadi beberapa indikator agar dapat terukur. Sebagai contoh berikut adalah beberapa alat yang sering digunakan dan contoh indikatornya:

1. Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan

Alat ini digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan dan persepsi pemangku kepentingan terhadap proses keterlibatan. Survei ini mencakup berbagai aspek, seperti kejelasan informasi, transparansi, frekuensi diskusi, serta pengaruh yang mereka rasakan terhadap pengambilan keputusan. Data dari survei ini memberikan gambaran sejauh mana pemangku kepentingan merasa terlibat dan dihargai dalam proses tersebut.

Metode yang digunakan pada survei ini dapat diuraikan sebagai berikut:

-  **Jenis survei:** Kuesioner berbasis skala *Likert* (1-5) untuk mengukur persepsi pemangku kepentingan terkait komunikasi, transparansi, partisipasi, dan hasil keterlibatan.
-  **Responden:** Semua kelompok pemangku kepentingan yang terlibat, termasuk pemerintah, MA, MHA, masyarakat marginal, komunitas lokal lainnya, LSM, dan sektor swasta, dengan data yang terpilah seperti berdasarkan gender dan usia.
-  **Pelaksanaan:** Survei dapat dilakukan secara online atau melalui wawancara langsung, tergantung pada aksesibilitas.
-  **Frekuensi:** Dapat dilakukan secara periodik, misalnya sekali setiap kuartal atau setelah kegiatan besar terkait REDD+.

Contoh pertanyaan dalam survei yang bisa diterapkan misalnya:

Tabel 5.1 Contoh Pertanyaan Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan





Aspek	Contoh Pertanyaan	Skala Penilaian
Kejelasan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Seberapa jelas informasi yang Anda terima terkait kegiatan pelaksanaan REDD+?</i> • <i>Seberapa jelas informasi yang Anda dapat terkait manfaat yang akan Anda terima dari pelaksanaan REDD+?</i> • <i>Seberapa jelas informasi yang Anda dapat terkait keterlibatan Anda di dalamnya?</i> 	(1 = Sangat Tidak Jelas, 5 = Sangat Jelas)
Transparansi	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Seberapa transparan proses komunikasi dan penyampaian informasi selama perencanaan kegiatan REDD+?</i> • <i>Seberapa transparan proses komunikasi dan penyampaian informasi selama implementasi kegiatan REDD+?</i> 	(1 = Sangat Tidak Transparan, 5 = Sangat Transparan)
Frekuensi Diskusi	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Apakah frekuensi diskusi dan konsultasi yang diadakan selama perencanaan kegiatan REDD+ sudah cukup bagi Anda?</i> • <i>Apakah frekuensi diskusi dan konsultasi yang diadakan selama implementasi kegiatan REDD+ sudah cukup bagi Anda?</i> 	(1 = Sangat Tidak Cukup, 5 = Sangat Cukup)
Pengaruh terhadap Pengambilan Keputusan	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Seberapa besar pengaruh yang Anda terima dari keputusan yang diambil dalam pelaksanaan REDD+?</i> • <i>Seberapa besar pengaruh yang Anda berikan terhadap keputusan yang diambil dalam pelaksanaan REDD+?</i> 	(1 = Tidak Ada Pengaruh, 5 = Sangat Berpengaruh)

Hasil survei dianalisis untuk memberikan gambaran tentang kepuasan dan area yang memerlukan perbaikan. Hasil analisis juga perlu ditunjang dengan data lain seperti hasil observasi lapangan, diskusi kelompok, dan lainnya agar dapat memberikan informasi yang menyeluruh dan menjadi pembelajaran untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan REDD+ berikutnya.

2. Pengukuran Indeks Partisipasi

Indeks ini membantu mengukur dan memberikan gambaran tentang tingkat dan intensitas partisipasi serta kontribusi pemangku kepentingan dalam berbagai kegiatan dari mulai perencanaan hingga implementasi program.

Metode yang digunakan pada indeks partisipasi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

-  **Parameter:** Melibatkan indikator-indikator seperti jumlah pertemuan yang dihadiri, tingkat kontribusi dalam pengambilan keputusan, dan keterlibatan dalam pelaksanaan program.
-  **Pengukuran:** Setiap indikator diberi nilai dan dihitung untuk memberikan skor total partisipasi.
-  **Analisis:** Data dapat diolah menjadi skor komposit yang merepresentasikan tingkat partisipasi keseluruhan dari setiap kelompok pemangku kepentingan.
-  **Frekuensi:** Dilakukan setelah setiap tahapan penting dalam program REDD+ atau secara berkala.

Contoh bentuk pertanyaan yang bisa diterapkan misalnya:

Tabel 5.2 Contoh Pertanyaan untuk Pengukuran Indeks Partisipasi

Aspek	Contoh Pertanyaan	Skala Penilaian
Jumlah Pertemuan yang Dihadiri	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Berapa kali Anda telah menghadiri pertemuan terkait perencanaan REDD+?</i> • <i>Berapa kali Anda telah menghadiri pertemuan terkait pelaksanaan kegiatan REDD+ dalam 6 bulan terakhir?</i> 	(0 = Tidak pernah, 1-2 kali, 3-5 kali, 6-10 kali, Lebih dari 10 kali)
Tingkat Kontribusi dalam Pengambilan Keputusan	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Seberapa sering Anda berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan selama pertemuan atau diskusi terkait program REDD+?</i> • <i>Jika Anda berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, seberapa besar dampak kontribusi Anda terhadap keputusan akhir?</i> 	(1 = Tidak Pernah, 5 = Selalu) (1 = Tidak Ada Dampak, 5 = Dampak Sangat Besar)
Keterlibatan dalam Pelaksanaan Program	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Apakah Anda terlibat dalam pelaksanaan program REDD+ di lapangan atau dalam kegiatan operasional lainnya?</i> • <i>Jika terlibat, dalam bentuk apa keterlibatan Anda? (Contoh: Konsultasi, Penyediaan Data, Pelaksanaan Teknis, Monitoring)</i> 	(1 = Tidak Terlibat, 5 = Sangat Terlibat)





Hasil survei ini dapat diolah bersama dengan data penunjang lainnya seperti hasil observasi lapangan, diskusi kelompok, dan metode lainnya untuk menghasilkan data yang relevan mengenai skor partisipasi individu atau kelompok pemangku kepentingan. Semakin tinggi nilai dari masing-masing indikator, semakin tinggi pula tingkat partisipasi kelompok tersebut.

3. Analisis Jaringan Sosial

Untuk memahami bagaimana informasi dan pengaruh bergerak di antara pemangku kepentingan, perlu dilakukan analisis jaringan sosial yang dapat mengidentifikasi aktor kunci dalam pengambilan keputusan, seperti yang diungkapkan dalam studi tentang kawasan hutan di Kalimantan (Egan, 2024).

Alat ini juga digunakan untuk mengidentifikasi pola interaksi antara pemangku kepentingan dan mengukur tingkat koneksi serta kolaborasi di antara mereka. Dengan analisis ini, pengelola kegiatan REDD+ dapat memahami bagaimana informasi dan pengaruh bergerak di antara pemangku kepentingan; mengidentifikasi aktor kunci yang memainkan peran sentral dalam jaringan tersebut; mengungkap potensi hambatan atau ketidakseimbangan dalam kolaborasi; dan menemukan strategi yang tepat untuk mengatasi hambatan/kesenjangan tersebut dan memperkuat hubungan antar pemangku kepentingan.

Metode yang digunakan pada analisis jaringan sosial ini dapat diuraikan sebagai berikut:

-  **Pengumpulan Data:** Informasi dikumpulkan tentang hubungan antar pemangku kepentingan, seperti pertukaran informasi, kemitraan, dan kolaborasi.
-  **Visualisasi:** Menggunakan perangkat lunak SNA (seperti Gephi atau UCINET) untuk membuat peta jaringan yang menunjukkan pola komunikasi dan pengaruh antar pihak.
-  **Analisis:** Dari peta jaringan, dapat diidentifikasi siapa yang paling berpengaruh (*centrality*) dan bagaimana informasi mengalir di antara pemangku kepentingan.
-  **Frekuensi:** Dilakukan secara berkala, tergantung pada perubahan dalam hubungan atau struktur keterlibatan.

Contoh pertanyaan yang bisa diterapkan misalnya:

Tabel 5.3 Contoh Pertanyaan dalam Pengumpulan Data Jaringan Sosial

Aspek	Contoh Pertanyaan	Skala Penilaian
Jumlah Pertemuan yang Dihadiri	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Seberapa sering Anda menerima informasi terkait skema REDD+ dari pemangku kepentingan lain?</i> • <i>Seberapa sering Anda menyebarkan informasi terkait program REDD+ kepada pemangku kepentingan lain?</i> • <i>Dari siapa Anda paling sering menerima informasi terkait pelaksanaan REDD+? (Sebagai contoh: pemerintah, MHA, LSM, dll.)</i> • <i>Kepada siapa Anda biasanya menyebarkan informasi terkait program ini?</i> 	<p>(1 = Tidak Pernah, 5 = Sangat Sering)</p> <p>(Pilihan terbuka untuk nama atau organisasi)</p>
Identifikasi Aktor Kunci	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Siapa yang menurut Anda paling mempengaruhi pengambilan keputusan terkait program REDD+ di jaringan Anda?</i> • <i>Menurut Anda, siapakah aktor yang paling banyak dihubungi oleh berbagai pihak dalam jaringan REDD+?</i> • <i>Seberapa besar pengaruh yang dimiliki oleh aktor tersebut dalam menentukan kebijakan atau arah program REDD+?</i> 	<p>(Pilihan terbuka untuk nama atau organisasi)</p> <p>(1 = Tidak Berpengaruh, 5 = Sangat Berpengaruh)</p>
Mengungkap Potensi Hambatan atau Ketidakseimbangan dalam Kolaborasi	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Apakah Anda merasa bahwa ada pihak dalam jaringan yang sulit diakses atau kurang transparan dalam berbagi informasi?</i> • <i>Apakah Anda merasa bahwa ada pihak yang mendominasi diskusi dan pengambilan keputusan sehingga mengurangi kolaborasi yang setara?</i> • <i>Siapa yang menurut Anda kurang terlibat atau termarginalkan dalam pengambilan keputusan dan pertukaran informasi?</i> 	<p>(1 = Tidak Pernah, 5 = Sangat Sering)</p> <p>(Pilihan terbuka untuk nama/organisasi)</p>

Data dari instrumen ini dapat digunakan untuk membuat peta jaringan sosial menggunakan perangkat lunak seperti Gephi atau UCINET, yang menggambarkan aliran informasi, pengaruh, dan posisi aktor kunci dalam jaringan.

Dengan menggunakan alat seperti survei kepuasan, indeks partisipasi, dan analisis jaringan sosial, pengelola REDD+ dapat mengevaluasi efektivitas keterlibatan pemangku kepentingan secara berkala. Evaluasi ini memungkinkan pengelola untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan interaksi dan dukungan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan REDD+ berikutnya. Misalnya, jika survei kepuasan menunjukkan bahwa pemangku kepentingan merasa kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan, pengelola dapat memperbaiki proses komunikasi dan meningkatkan kesempatan partisipasi. Demikian pula, jika analisis jaringan sosial mengungkap adanya pemangku kepentingan yang kurang terhubung, langkah-langkah dapat diambil untuk memperkuat hubungan dan memastikan bahwa semua suara didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.



BAB VI

PENUTUP

Keterlibatan pemangku kepentingan melibatkan interaksi aktif antara proyek atau organisasi dengan individu atau kelompok yang memiliki kepentingan, pengaruh, atau terkena dampak oleh kegiatan tersebut. Proses ini mencakup identifikasi pemangku kepentingan, analisis kebutuhan, dan kepentingan mereka, serta pengembangan strategi komunikasi dan kolaborasi yang efektif.

Dalam program kehutanan dan REDD+, dukungan dan partisipasi dari MA/MHA, masyarakat marginal, dan komunitas lokal lainnya, pemerintah, LSM, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk mencapai tujuan konservasi dan pengurangan emisi. Melibatkan mereka secara aktif membantu mengatasi konflik, meningkatkan transparansi, dan memastikan distribusi manfaat yang adil.

Salah satu metode yang sering digunakan adalah RACI (*Responsible, Accountable, Consulted, Informed*), yang membantu mengidentifikasi peran dan tanggung jawab setiap pemangku kepentingan. Selain itu, survei kepentingan dapat digunakan untuk mengumpulkan pendapat dan kebutuhan mereka, sehingga memberikan gambaran yang komprehensif tentang harapan setiap pihak.

Keterlibatan pemangku kepentingan adalah aspek krusial dalam program kehutanan dan REDD+. Metode seperti RACI dan Matriks Pengaruh dan Kepentingan membantu mengidentifikasi peran dan kebutuhan pemangku kepentingan, memastikan partisipasi dan dukungan yang efektif. Studi kasus dari Kalimantan Tengah menekankan pentingnya pendekatan yang inklusif, penghormatan terhadap hak-hak adat, dan komunikasi yang berkelanjutan untuk mengelola dan menyelesaikan konflik. Dengan membuat rencana tindakan keterlibatan yang terstruktur, semua pemangku kepentingan dapat menerima informasi yang tepat pada waktu yang tepat, sehingga meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan pelaksanaan REDD+.



DAFTAR PUSTAKA

- Angelsen, A., Brockhaus, M., Sunderlin, W. D., & others. (2012). *REDD+ on the Ground: A Case Book of Subnational Initiatives across the Globe*. CIFOR.
- Biglaiser, G. S., & DeRouen, K. Jr. (2019). *The Handbook of Corporate Political Strategy*. Routledge.
- Colfer, C. J. P. (2006). *The Politics of Decentralization: Forests, Power and People*. Earthscan.
- Egan, A. (2024, Juli 4). *Strengthening Forested Area Planning and Management In Non-state Forest Areas in Kalimantan*. *Panorama Solutions*. <https://panorama.solutions/en/solution/strengthening-forested-area-planning-and-management-non-state-forest-areas-kalimantan>
- Fischer, J., & Blüthgen, N. (2019). *Assessing Stakeholder Engagement in Conservation Projects: Insights from a Systematic Review*. *Conservation Letters*. <https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/conl.12658>
- Freeman, R. E., Harrison, J. S., & Wicks, A. C. (2010). *Stakeholder Theory: The State of the Art*. Cambridge University Press.
- Innes, J. L., Minasny, A. A. N. W., & Prabhu, R. (2014). *Understanding Forests, Forest Management and REDD+*. Earthscan.
- Jong, H. N. (2025, Januari 25). *Jokowi's Land Reform Agenda Stalls as Conflicts Nearly Double, Report Shows*. *Mongabay*. <https://news.mongabay.com/2024/01/jokowis-land-reform-agenda-stalls-as-conflicts-nearly-double-report-shows/>
- Leal Filho, W., Azul, A. M., Brandli, L., & Özuyar, P. G. (2016). *Engaging Stakeholders in Education for Sustainable Development at University Level*. Springer.
- Larson, A. M., & Pacheco, P. (2016). *Forests and Climate Change: The Social Dimensions of REDD+ in Latin America*. University of Arizona Press.
- Ma, T. (2020). *Stakeholder Engagement: The Game Changer for Program and Project Success*. CRC Press.
- Moeliono, M., Wollenberg, E., & Limberg, G. (2009). *Community Forestry in Indonesia: Policy and Practice*. CIFOR.
- Pretty, J. (1995). *Participatory Learning for Sustainable Agriculture*. *World Development*. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(95\)00046-F](https://doi.org/10.1016/0305-750X(95)00046-F)
- Reed, M. S., & McDonald, T. (2016). *Stakeholder Engagement for Environmental Management: A Review of the Literature*. *Environmental Management*.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2014). *Social and Environmental Standards (SES) Guidance Note: Stakeholder Engagement*. UNDP. <https://www.undp.org/publications/social-and-environmental-standards-ses-guidance-note-stakeholder-engagement>



